

ISU GENDER DALAM MANAJEMEN BENCANA DAN LINGKUNGAN DI INDONESIA

SYARKAWI¹, MUHAMMAD AKBAR MAULANA²

Administrasi Negara, Universitas Pamulang¹, Ilmu Pemerintahan, Universitas Pamulang²

Email: dosen03005@unpam.ac.id¹, dosen02927@unpam.ac.id²

Abstract: *Barious disasters in indonesia, such as the 2004 tsunami in aceh and the 2010 eruption of mount merapi, have impacted men and women differently. Gender issues are a crucial aspect of disaster and environmental management in indonesia, considering the high vulnerability of women and marginalized groups to disaster impacts, such as difficulties in accessing healthcare facilities and adequate shelters, as well as the increased risk of gender-based violence during disaster recovery periods. This study aims to examine gender issues in disaster and environmental management in indonesia. It employs a descriptive qualitative research method with a literature review approach, where the researchers collect, analyze, and interpret information from various written sources, such as government reports, academic studies, and publications from non-governmental organizations. The findings reveal that gender inequality often exacerbates the impact of disasters on women, such as increased rates of gender-based violence in evacuation shelters or limited access to humanitarian aid. Meanwhile, their involvement in decision-making processes, for instance, during emergency response and post-disaster recovery, remains minimal.*

Keywords: *Gender Issues, Disaster Management, Environment.*

Abstrak: Berbagai bencana yang terjadi di Indonesia, seperti tsunami di Aceh pada tahun 2004, letusan gunung Merapi pada tahun 2010 dan tsunami Palu 2018, membawa dampak dan beban yang dirasakan secara berbeda oleh laki-laki dan perempuan. Isu gender merupakan aspek penting dalam manajemen bencana dan lingkungan di Indonesia, mengingat tingginya kerentanan perempuan dan kelompok marginal terhadap dampak bencana, seperti kesulitan mengakses fasilitas kesehatan dan tempat penampungan yang layak, serta meningkatnya risiko kekerasan berbasis gender selama masa pemulihan bencana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui isu gender dalam manajemen bencana dan lingkungan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur, di mana peneliti mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti laporan pemerintah, penelitian akademis, dan publikasi organisasi non-pemerintah. Hasil penelitian ini menemukan bahwa ketimpangan gender seringkali memperburuk dampak bencana terhadap perempuan, seperti meningkatnya angka kekerasan berbasis gender di tempat pengungsian atau terbatasnya akses terhadap bantuan kemanusiaan. Sementara itu, keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan, misalnya di tingkat tanggap darurat, pemulihan pasca bencana masih minim.

Kata kunci: Isu Gender, Manajemen Bencana, Lingkungan.

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang sangat rawan terhadap berbagai jenis bencana alam; termasuk, gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir dan tanah longsor. Lonjakan tingkat prioritas kejadian bencana, yang memengaruhi status dan kondisi sosio-ekonomi serta kerentanan berbagai kelompok masyarakat, telah terjadi dalam beberapa dekade terakhir, contoh nyata tsunami di Aceh, 2004; letusan gunung merapi, 2010; dan tsunami di Palu, 2018. Peristiwa-peristiwa itu tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik dan ekonomi, tetapi juga mengungkap kerentanan sosial yang berbeda di antara berbagai kelompok, khususnya berdasarkan gender. Faktor gender menjadi fokus gender-diskors sering kali diabaikan dalam manajemen bencana dan pengelolaan lingkungan.

Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), perempuan memiliki risiko 14 kali lebih tinggi dibanding laki-laki dewasa dalam situasi bencana.¹ Hal ini disebabkan oleh peran gender yang menempatkan perempuan lebih banyak di ranah domestik, sehingga akses mereka terhadap informasi dan sumber daya penanggulangan bencana menjadi terbatas. Selain itu, perempuan sering kali menghadapi tantangan tambahan, seperti meningkatnya risiko kekerasan berbasis gender di tempat pengungsian dan beban ganda dalam mengurus keluarga selama masa pemulihan.² Gender merupakan konsep yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural/budaya atau bukan merupakan konstruksi biologis, yang mana mengacu pada klasifikasi sosial 'maskulin' dan 'feminin,' peran, harapan, nilai dan norma masyarakat untuk membedakan sifat-sifat non-lahiriah antara laki-laki dan perempuan.³

Selain itu, perempuan sering kali menghadapi tantangan tambahan, seperti meningkatnya risiko kekerasan berbasis gender di tempat pengungsian. Peningkatan kasus kekerasan telah tercatat dalam beberapa peristiwa bencana besar, seperti di Aceh (2005-2006), Padang (2010), dan Sulawesi Tengah (2018-2019). Kekerasan berbasis gender merupakan ancaman yang serius bagi para wanita dan anak perempuannya, sebelum dan selama bencana.⁴ Permasalahan gender tidak hanya berkaitan dengan situasi yang lebih rentan bagi perempuan saat kejadian bencana, tetapi juga rentan menjadi korban kondisi pasca bencana. Sejarah telah menunjukkan peningkatan ketidakamanan perempuan saat terjadi bencana. Sebagai tambahan, Komnas Perempuan, pada tahun 2002 melaporkan beberapa kasus kekerasan berbasis gender di situasi darurat kemanusiaan, antara lain tindak sistematis kekerasan yang terjadi selama konflik Aceh tahun 1989-1998. Korbannya adalah perempuan dengan jumlah paling minimal 20 kasus hubungan seksual yang tidak *safe*, kekerasan seksual, dan diskriminasi serta eksploitasi seksual.⁵ Pada tahun 2006, laporan dari *Community Support Center (CSC)* kepada Unfpa Indonesia menunjukkan bahwa selama respon tsunami di Aceh, terdapat setidaknya 97 kasus kekerasan berbasis gender. Selain itu, dalam laporan final untuk respon bencana gempa di Padang tahun 2010, UNFPA Indonesia juga menyatakan bahwa terdapat 3 kasus perkosaan di tenda pengungsian korban gempa Padang, Sumatera Barat.⁶

Ketimpangan gender dalam pengelolaan bencana membuat perempuan kekurangan ketahanan terhadap kekerasan. Beberapa faktanya seperti kurangnya bantuan berbasis gender, hilangnya tempat tinggal pengungsi, dan lemahnya struktur perlindungan serta pelaporan areal korban membuat perempuan sangat rawan. Dalam konteks bencana, perempuan di masa darurat harus melawan bukan hanya konsekuensi dampak fisik, namun juga ancaman terhadap keamanan dan martabat mereka. Alasan mengapa isu gender sangat penting dalam pengelolaan bencana, karena ketimpangan gender tidaklah hanya persoalan sosial tetapi juga berdampak pada keseluruhan tanggapan terhadap bencana. Jika dibiarkan begitu saja, permasalahan akan memperburuk keadaan perempuan bukan hanya karena dampak langsung bencana, namun juga kekurangan kemampuan sosial ekonomi yang dihadapi.

Isu gender dalam manajemen bencana telah menjadi perhatian penting dalam berbagai penelitian dan teori. Salah satu teori yang relevan adalah teori kerentanan yang menekankan

¹ Parasasri, R. R. A., & Nurhaeni, I. D. H. (2021). Manajemen bencana responsif gender: Kajian inovasi layanan organisasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta. *Jurnal Wacana Publik*, 1(1), 62-81.

² BPBD Kabupaten Bogor. (2017). *Pengarustamaan gender dalam penanggulangan bencana*. Diakses pada 9 Januari 2025, dari https://bpbdbogorkab.go.id/berita/Seputar-OPD/pengarustamaan-gender-dalam-penanggulangan-bencana?utm_source=

³ Oakley. (2015). *Sex, Gender and Society*. United Kingdom: Ashgate.

⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). *Kemen PPPA dan UNFPA refleksikan 5 tahun pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender dalam bencana pada Hari Kemanusiaan Sedunia 2024*. Diakses pada 9 Januari 2025, dari https://kemenpppa.go.id/page/view/NTM2NA%3D%3D?utm_source=

⁵ Syakur, R. A. (2024). *Kerentanan berbasis gender pada situasi bencana*. Diakses pada 9 Januari 2025, dari https://pkbi.or.id/kerentanan-berbasis-gender-pada-situasi-bencana/?utm_source=

⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2017). *Panduan teknis perlindungan hak perempuan dan anak dari kekerasan berbasis gender pada situasi bencana*. Jakarta: KPPPA.

bahwa sebagian besar determinan kerentanan terhadap bencana adalah fakta sosial, ekonomi, politik, dan gender yang mempengaruhi perempuan dan laki-laki. Perempuan sering kali memiliki akses terbatas terhadap sumber daya dan informasi, yang meningkatkan kerentanan mereka saat bencana terjadi.⁷ Kerentanan merupakan suatu kondisi dari komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi keadaan bahaya. Tingkat kerentanan adalah suatu hal yang penting untuk diketahui sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya bencana karena bencana baru akan terjadi pada kondisi yang rentan. Tingkat kerentanan dapat ditinjau dari kerentanan fisik (infrastruktur), sosial, kependudukan dan ekonomi.⁸

Dalam konteks manajemen bencana di Indonesia, berbagai penelitian telah menyoroti pentingnya peran perempuan dalam setiap fase penanggulangan bencana. Misalnya, studi oleh *Community Support Center (CSC)* kepada UNFPA Indonesia pada tahun 2006 mencatat setidaknya 97 kasus kekerasan berbasis gender selama respons tsunami di Aceh, menunjukkan kerentanan perempuan dalam situasi darurat.⁹ Penelitian oleh Agustina Larasati (2022) tentang partisipasi perempuan di lembaga penanggulangan bencana dan perubahan iklim Nahdlatul Ulama mengungkapkan bahwa partisipasi perempuan dalam lembaga tersebut masih minim, meskipun mereka memiliki peran penting dalam mitigasi dan adaptasi terhadap bencana.¹⁰

Lebih lanjut, studi oleh Satoshi Takada (2017) menunjukkan bahwa peran perempuan dalam penanganan bencana belum banyak dikaji, padahal mereka memiliki peran sentral dalam mengurus anak-anak dan orang tua, serta menjadi agen kerentanan bagi lansia dan anak-anak.¹¹ Penelitian oleh Gyfani Hedriyanti dan Syamsuddin. AB (2021) juga menyoroti bahwa perempuan memiliki peran penting dalam penanggulangan bencana pada tiga tingkatan: pra-bencana, saat bencana, dan pasca-bencana.¹² Selain itu, laporan UNFPA Indonesia menekankan bahwa penguatan kapasitas dan peran perempuan dalam penanggulangan bencana penting untuk menghilangkan ketidakadilan gender dan meningkatkan efektivitas respons bencana.

Meskipun berbagai penelitian telah menyoroti pentingnya memperhatikan gender dalam manajemen bencana di Indonesia, terdapat beberapa kesenjangan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, yang akan menjadi titik perhatian. Pertama, implementasi kebijakan yang mendorong pengarusutamaan gender seringkali tidak konsisten dan kurang efektif di lapangan. Kedua, partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan terkait manajemen bencana masih minim. Ketiga, situasi bencana meningkatkan risiko kekerasan berbasis gender, namun mekanisme perlindungan dan pelaporan masih lemah. Laporan menunjukkan adanya peningkatan kasus kekerasan seksual selama masa tanggap darurat bencana, namun respons terhadap isu ini masih terbatas. Keempat, kurangnya data terpilah berdasarkan gender menghambat perencanaan dan respons bencana yang responsif gender. Kelima, kurangnya pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi petugas penanggulangan bencana mengenai isu gender. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kesenjangan-kesenjangan tersebut, sehingga dapat meningkatkan efektivitas manajemen bencana yang responsif terhadap isu-isu gender di Indonesia.

⁷ Murtakhamah, T. (2013). Pentingnya pengarusutamaan gender dalam program pengurangan risiko bencana. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 2(1).

⁸ Pelaksana Harian Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana. (2007). *Pengenalan karakteristik bencana dan upaya mitigasinya di Indonesia* (hlm. 11–14). Jakarta: Bakornas PB.

⁹ Wibowo, B. S., et al. (2023). *Profil pemimpin perempuan Indonesia dalam penanggulangan bencana*. Jakarta: UNFPA. Diakses pada 9 Januari 2025, dari https://indonesia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/booklet_profil_pemimpin_perempuan_indonesia_dalam_penanggulangan_bencana.pdf?utm_source.

¹⁰ Larasati, A. (2022). *Skripsi: Partisipasi perempuan di lembaga penanggulangan bencana dan perubahan iklim Nahdlatul Ulama*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

¹¹ Takada, S. (2017). *The 13th International Seminar on Disaster: Gender-Inclusive Disaster Risk Management*. Yogyakarta: Fakultas Kedokteran UGM. Diakses pada 9 Januari 2025, dari https://ugm.ac.id/id/berita/15428-perempuan-berperan-dalam-manajemen-risiko-bencana/?utm_source.

¹² Hedriyanti, G., & Syamsuddin, A. B. (2021). Peran perempuan terhadap penanggulangan bencana di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial*, 4(2), 21.

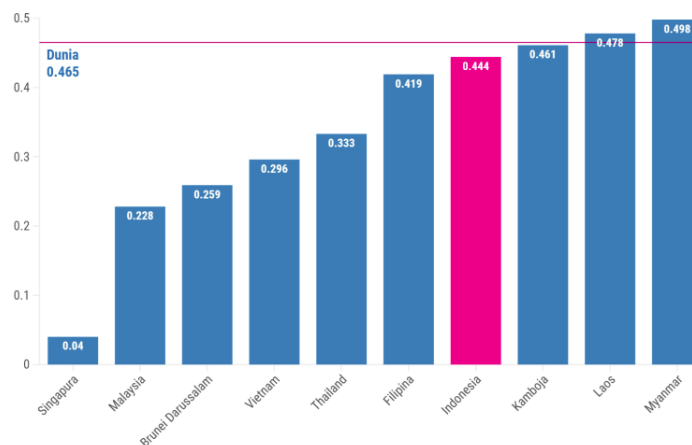
B. Metodologi penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh berbagai subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa.¹³ Penelitian deskriptif adalah berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang terjadi sekarang berdasar data yang didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang terjadi. Dengan kata lain, penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini.¹⁴ Dalam hal ini berkaitan dengan isu gender dalam manajemen bencana di Indonesia. Dengan sumber data yang diperoleh dari penelitian ini berupa data sekunder yaitu dengan cara mengumpulkan data-data berupa dokumentasi, studi literatur, data statistik dari lembaga resmi dan arsip maupun laporan, serta penelitian-penelitian terdahulu yang berikan langsung dengan isu gender dalam manajemen bencana dan lingkungan. Kemudian dianalisis berdasarkan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan analisis literatur, ditemukan bahwa bencana di Indonesia memberikan dampak yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, dengan perempuan sering kali mengalami kerentanan yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh peran tradisional perempuan dalam rumah tangga, yang membatasi mobilitas dan akses mereka terhadap sumber daya selama bencana. Selain itu, peran tradisional perempuan dalam masyarakat patriarki sering kali menyebabkan kebutuhan khusus mereka diabaikan dalam penanganan bencana. Misalnya, kebutuhan akan produk kesehatan perempuan seperti pembalut dan lainnya sering tidak terpenuhi di tempat pengungsian. Hal tersebut tidak terlepas dari ketimpangan gender di Indonesia dalam berbagai bidang, seperti bidang kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan akses pasar tenaga kerja, termasuk dalam manajemen kebencanaan. Selain itu, ketimpangan gender dalam manajemen bencana di Indonesia juga tercermin dalam akses perempuan terhadap sumber daya dan informasi yang krusial selama dan pasca bencana. Perempuan sering kali memiliki akses terbatas terhadap informasi terkait mitigasi bencana, peringatan dini, dan prosedur evakuasi, yang dapat meningkatkan kerentanannya.

Gambar 1. Indeks Ketimpangan Gender di Asia Tenggara tahun 2021



Sumber: BPS (2022) dalam indonesia.unfa.org

Indeks ketimpangan gender Indonesia pada tahun 2021 menempati peringkat 110 dari 170 negara. Mengalami perbaikan jika melihat indeks kesenjangan gender (*gender gap index/ggi*) walaupun beberapa komponen ketimpangan gender pun masih berada di bawah rata-rata global

¹³ Syarkawi, et al. (2023). Village financial management in Gampong Blang Makmur Kuala Batee District Southwest Aceh Regency. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, 15(2), 187–195. <https://doi.org/10.24114/jupiiis.v15i2.48963>

¹⁴ Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (hlm. 209). Bandung: Alfabeta.

di tahun 2022. Indonesia sendiri memiliki gender gap index sebesar 0,697 dan menempati peringkat 92 dari 146 negara. Dampak bencana bersifat tidak netral atau sama rata dialami oleh masyarakat. Dampaknya dipengaruhi oleh perbedaan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, serta identitas individu dan kelompok. Faktor kerentanan juga berkaitan erat dengan kondisi struktural dalam masyarakat. Ketimpangan gender memperburuk dampak bencana terhadap perempuan karena mereka memiliki akses yang lebih terbatas terhadap sumber daya ekonomi dan informasi kebencanaan.¹⁵ Dalam konteks ini, pendekatan struktural untuk kerentanan gender sangat penting. Ini termasuk peningkatan akses perempuan terhadap sumber daya, peran aktif dalam pengambilan keputusan, dan pemberdayaan ekonomi. Ketidaksetaraan gender di lapangan manajemen bencana di Indonesia hanya memperburuk dampak bencana pada perempuan. Untuk ini, perlu pendekatan gender responsif yang mulai dari perencanaan hingga implementasi kebijakan. Pelibatan perempuan dalam keputusan dan usulan kebijakan, fasilitas ramah gender, dan sistem yang lebih baik daftar kontrol manfaat utama dalam menciptakan manajemen bencana yang inklusif dan berkeadilan.

Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana juga masih sangat minim. Struktur-struktur kepemimpinan yang didominasi laki-laki menyebabkan perspektif dan kebutuhan perempuan kurang terpenuhi dalam manajemen bencana. Kemalasan akses dan partisipasi menciptakan korban wanita yang tinggi. Di lain sisi, laki-laki kembali dominan dalam penanggulangan bencana. Memang perempuan memiliki peran penting untuk memerankan penanggap bencana. Akan tetapi, untuk mencapai hal tersebut, peningkatan kapasitas dan penyediaan akses terhadap informasi dan pengetahuan kebencanaan menjadi penting untuk diberikan pada perempuan. Data menunjukkan bahwa perempuan lebih rentan menjadi korban bencana alam dibandingkan laki-laki di Indonesia. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 60 hingga 70 persen korban bencana di Indonesia adalah perempuan dan anak-anak.

Dalam situasi bencana, perempuan sering kali menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mengakses bantuan kemanusiaan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Kebutuhan khusus perempuan dan anak perempuan sering diabaikan selama distribusi bantuan, dan ini berkontribusi pada risiko meningkat dan kerentanannya terhadap situasi darurat. Disebabkan kurangnya perspektif gender dalam perencanaan bantuan dan minimnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Meskipun, dalam praktiknya, tidak semua perempuan yang berkecimpung di bidang politik memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan-keputusan strategis. Namun, mereka setidaknya bisa memperjuangkan peran mereka mewakili dan memperjuangkan aspirasi perempuan di level kebijakan publik.

Keterlibatan perempuan dalam setiap tahap manajemen bencana—mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi—sangat penting untuk memastikan bahwa kebutuhan dan perspektif mereka terakomodasi. Perempuan memiliki pengetahuan lokal dan pengalaman yang berharga yang dapat meningkatkan efektivitas program tanggap darurat. Tampak jelas bahwa perempuan yang selama ini dipandang sebagai objek, dalam arti menjadi korban bencana, ternyata dapat berperan sebagai subjek dalam penanggulangan bencana, baik pada masa pra-bencana, tanggapan bencana, maupun pasca-bencana. Dalam masa pra-bencana perempuan dapat berperan dalam pengurangan risiko bencana yang berperspektif gender. Peran wanita dalam masa tanggap darurat juga tidak kalah penting, terutama dalam penyediaan air bersih dan makanan; sementara itu, peran perempuan dalam pasca bencana meliputi peran dalam layanan kesehatan reproduksi, akses terhadap pendidikan dan keterampilan, serta partisipasi perempuan dalam setiap usaha rehabilitasi dan rekonstruksi.¹⁶

Mengumpulkan data terpilah berdasarkan gender dalam manajemen bencana sangat penting untuk memahami dampak spesifik yang dialami oleh laki-laki dan perempuan. Data terpilah memungkinkan identifikasi kebutuhan khusus masing-masing gender, sehingga intervensi yang

¹⁵ UNFA Indonesia. (2023). *Dampak perubahan iklim terhadap kekerasan berbasis gender di Indonesia*. Diakses pada 14 Januari 2024, dari https://indonesia.unfa.org/sites/default/files/pub-pdf/1_hasil_riset_full_report_gecc_2023_bahasa_indonesia_1_0.pdf?utm_source=

¹⁶ Hedriyanti, G., & Syamsuddin, A. B. (2021). Peran perempuan terhadap penanggulangan bencana di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial*, 4(2), 24.

dirancang dapat lebih efektif dan tepat sasaran. Data terpilah membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan khusus perempuan dan laki-laki selama dan pasca bencana. Misalnya, perempuan mungkin memerlukan akses ke fasilitas sanitasi yang ramah gender atau produk kesehatan reproduksi, sementara laki-laki mungkin memerlukan pelatihan keterampilan untuk pemulihan ekonomi. Dengan data terpilah, perencanaan dan penganggaran dapat disusun secara responsif gender, memastikan bahwa alokasi sumber daya memenuhi kebutuhan spesifik kedua gender secara adil.¹⁷ Data terpilah memungkinkan evaluasi dampak bencana terhadap laki-laki dan perempuan secara terpisah, sehingga intervensi yang dilakukan dapat lebih tepat sasaran dan efektif.

Dengan demikian, upaya untuk mengatasi ketimpangan gender dalam manajemen bencana di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program, dengan memastikan keterlibatan aktif perempuan dan penyediaan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

D. Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa isu gender merupakan aspek yang sangat penting dalam manajemen bencana di Indonesia. Ketimpangan gender yang masih terjadi di berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam akses terhadap sumber daya, kesehatan, dan pengambilan keputusan, memperburuk dampak bencana bagi perempuan. Temuan menunjukkan bahwa perempuan sering kali lebih rentan terhadap bencana karena peran tradisional mereka dalam rumah tangga dan masyarakat patriarki, yang membatasi akses dan mobilitas mereka. Kebutuhan spesifik perempuan, seperti produk kesehatan dan fasilitas ramah gender, sering diabaikan dalam tanggap darurat dan pemulihan bencana. Selain itu, keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan masih sangat minim, menyebabkan kebutuhan dan perspektif mereka kurang terakomodasi.

Untuk menciptakan manajemen bencana yang inklusif dan berkeadilan gender, peneliti menyarankan langkah-langkah berikut: 1). Memberikan ruang bagi perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di semua tahapan manajemen bencana, mulai dari perencanaan hingga implementasi kebijakan. 2). Memastikan ketersediaan fasilitas yang mendukung kebutuhan khusus perempuan, seperti ruang laktasi, pembalut, dan perlengkapan kesehatan perempuan di tempat pengungsian. 3). Mengembangkan sistem data terpilah yang mencakup informasi terkait gender untuk memudahkan perencanaan dan implementasi kebijakan yang responsif gender. 4). Mengintegrasikan program pemberdayaan ekonomi dan pelatihan kebencanaan untuk perempuan agar mereka memiliki akses terhadap sumber daya dan informasi yang memadai. 5). Melakukan kampanye dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perspektif gender dalam manajemen bencana.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan manajemen bencana di Indonesia dapat menjadi lebih inklusif, responsif terhadap kebutuhan gender, dan mampu mengurangi kerentanan perempuan terhadap dampak bencana. Keberhasilan ini memerlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, akademisi, dan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor. (2017). Pengarusutamaan gender dalam penanggulangan bencana. Diakses pada 9 Januari 2025, dari <https://bpbdbogorkab.go.id/berita/Seputar-OPD/pengarustamaan-gender-dalam-penanggulangan-bencana>
- Hedriyanti, G., & Syamsuddin, A. B. (2021). Peran perempuan terhadap penanggulangan bencana di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial*, 4(2), 21-24.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2017). *Panduan teknis perlindungan hak perempuan dan anak dari kekerasan berbasis gender pada situasi bencana*. Jakarta: KPPPA.

¹⁷ Murtakhamah, T. (2013). Pentingnya pengarusutamaan gender dalam program pengurangan risiko bencana. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 2(1).

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). Kemen PPPA dan UNFPA refleksikan 5 tahun pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender dalam bencana pada Hari Kemanusiaan Sedunia 2024. Diakses pada 9 Januari 2025, dari <https://kemenpppa.go.id/page/view/NTM2NA>
- Larasati, A. (2022). *Partisipasi perempuan di lembaga penanggulangan bencana dan perubahan iklim Nahdlatul Ulama* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Murtakhamah, T. (2013). Pentingnya pengarusutamaan gender dalam program pengurangan risiko bencana. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 2(1).
- Oakley, A. (2015). *Sex, gender and society*. Ashgate.
- Parasasri, R. R. A., & Nurhaeni, I. D. H. (2021). Manajemen bencana responsif gender: Kajian inovasi layanan organisasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta. *Jurnal Wacana Publik*, 1(1), 62-81.
- Pelaksana Harian Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana. (2007). *Pengenalan karakteristik bencana dan upaya mitigasinya di Indonesia*. Jakarta: Bakornas PB.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Syakur, R. A. (2024). Kerentanan berbasis gender pada situasi bencana. Diakses pada 9 Januari 2025, dari <https://pkbi.or.id/kerentanan-berbasis-gender-pada-situasi-bencana/>
- Syarkawi, et al. (2023). Village financial management in Gampong Blang Makmur Kuala Batee District Southwest Aceh Regency. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, 15(2), 187-195. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v15i2.48963>
- Takada, S. (2017). The 13th International Seminar on Disaster: Gender-Inclusive Disaster Risk Management. Diakses pada 9 Januari 2025, dari <https://ugm.ac.id/id/berita/15428-perempuan-berperan-dalam-manajemen-risiko-bencana/>
- UNFPA Indonesia. (2023). Dampak perubahan iklim terhadap kekerasan berbasis gender di Indonesia. Diakses pada 14 Januari 2024, dari https://indonesia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/1_hasil_riset_full_report_gecc_2023_bahasa_indonesia_1_0.pdf
- Wibowo, B. S., et al. (2023). Profil pemimpin perempuan Indonesia dalam penanggulangan bencana. Jakarta: UNFPA. Diakses pada 9 Januari 2025, dari https://indonesia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/booklet_profil_pemimpin_perempuan_indonesia_dalam_penanggulangan_bencana.pdf